



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## REKRUTMEN CALON ANGGOTA KPPS PADA PILKADA SERENTAK 2024

**Dewi Sendhikasari Dharmaningtias**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[dewi.sendhikasari@dpr.go.id](mailto:dewi.sendhikasari@dpr.go.id)

**Ully Ngesti Pratiwi**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[ully.pratiwi@dpr.go.id](mailto:ully.pratiwi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di berbagai provinsi dan kabupaten/kota semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan tahap pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 17-28 September 2024. KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Rekrutmen calon anggota KPPS diatur berdasarkan Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, KPU berencana merekrut 3.045.623 calon anggota KPPS yang akan disebar di 435.089 TPS, untuk melayani sekitar 203.290.554 pemilih. KPPS memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam proses pemungutan suara di TPS. Tugas anggota KPPS mencakup kesiapan sarana/prasana, seperti bilik suara dan kotak suara yang tersedia dengan baik di TPS. KPPS juga mengelola proses pemungutan suara agar dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertanggung jawab melakukan penghitungan suara, dan menuangkannya dalam berita acara rekapitulasi hasil pemilihan untuk disampaikan kepada PPS.

Proses rekrutmen calon anggota KPPS ini tidak hanya memastikan kelancaran pemungutan suara, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Masyarakat yang menjadi anggota KPPS dapat turut serta memastikan transparansi dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Namun berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam proses rekrutmen KPPS, yang membutuhkan strategi antisipasi dari KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Beberapa permasalahan tersebut antara lain *pertama*, tidak meratanya jumlah pendaftar di beberapa daerah, yaitu penumpukan jumlah pendaftar di beberapa TPS, sedangkan di TPS lainnya belum memenuhi kuota. Hal itu disebabkan kurangnya minat dan kesadaran masyarakat menjadi anggota KPPS. *Kedua*, persyaratan administratif yaitu jenjang pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Syarat tersebut ideal di beberapa daerah, namun menjadi hambatan di daerah tertentu yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan. *Ketiga*, masalah pencatutan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang berujung menyebabkan terhadap beberapa orang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif sebagai anggota KPPS.

Upaya KPU untuk mengantisipasi beberapa permasalahan tersebut yaitu melalui sosialisasi aktif dan edukasi kepada masyarakat. KPU akan melaksanakan kampanye sosialisasi yang lebih luas mengenai pentingnya peran KPPS dan proses rekrutmen, termasuk memberikan informasi tentang syarat-syarat pendaftaran dan manfaat menjadi anggota KPPS. Selain itu, KPU juga mengembangkan strategi "*hunting talent*" untuk mencari individu-individu yang memiliki potensi dan kompetensi untuk menjadi anggota KPPS, dengan melibatkan pendekatan langsung kepada komunitas lokal dan organisasi masyarakat untuk merekomendasikan calon anggota KPPS.

Bawaslu juga turut melakukan pengawasan proaktif terhadap proses rekrutmen KPPS melalui patroli pengawasan di TPS termasuk pemasangan *timeline* pendaftaran, ketersediaan petugas, dan kelengkapan syarat pendaftar. Bawaslu juga dapat memastikan bahwa rekrutmen KPPS dibuka seluas-luasnya terkait peluang kesempatan mendaftar serta melalui proses yang terstandarisasi dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif, efisien, serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum.

## Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI telah melakukan beberapa kunjungan kerja spesifik guna melihat sejauh mana kesiapan beberapa daerah dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 di antaranya Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Kunjungan ini berfokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah.

Di samping itu, untuk tahapan rekrutmen calon anggota KPPS, Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk mengoptimalkan sosialisasi dan pengawasan yang intensif sehingga dalam proses rekrutmen tersebut didapatkan anggota KPPS yang mempunyai kemampuan dan integritas untuk menciptakan proses pemungutan suara yang bersih dan adil. Hal ini penting karena anggota KPPS merupakan salah satu ujung tombak penyelenggaraan Pilkada yang diharapkan mampu menjaga dan memastikan tahapan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan secara terbuka, berkeadilan, demokratis serta sekaligus tertib dan lancar.

## Sumber

antaranews.com, 17 September 2024;  
banyumas.bawaslu.go.id, 22 September 2024;  
berita.depok.go.id, 17 September 2024;  
detik.com, 19 September 2024;  
kompas.com, 18 September 2024;  
pangkep.bawaslu.go.id, 18 September 2024; dan  
tirto.id, 17 September 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetyawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024